



**SEMINAR NASIONAL  
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI**



**PENGEMBANGAN DAN INOVASI KURIKULUM  
PENDIDIKAN INDONESIA BERBASIS  
KOMPETENSI**

Oleh:

Drs. Wesly Hutabarat, M.sc.

Makalah yang dipresentasikan pada Seminar Nasional  
Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK )  
30 September 2004, Auditorium - UNIMED

**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
2004**

THE  
Character Building  
UNIVERSITY

PENGEMBANGAN DAN INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN  
INDONESIA BERBASIS KOMPETENSI

Oleh  
Drs. Wesly Hutabarat, M.Sc

Makalah Ini Disampaikan pada Seminar Nasional Berbasis Kompetensi,  
Temu Usaha, Dan Pameran Teknologi Tepat Guna di Lembaga Pengabdian Kepada  
Masyarakat Universitas Negeri Medan, pada Tanggal 30 September – 2 Oktober 2004



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPM)  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Tanggal 22 September 2004

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Jln. Willem Iskandar, Psr V - Kotak Pos No. 1589 Medan 20221 Telp. (061) 6632195, 6613365 Psw. 224 Fax. (061) 6614002

**SERTIFIKAT**

No. 456 /J39.8/PM.04.06/2004

Diberikan kepada :

*Brs. Wesly Hutabarat, M.Sc.*

Yang telah berperan aktif sebagai :

*Pemakalah*

**Seminar Nasional  
Kurikulum Berbasis Kompetensi**  
tanggal, 30 September 2004 di UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Medan, 30 September 2004



Mengalahui :  
Rektor Universitas Negeri Medan

Prof. Dr. Hj. Dianius Djamin, SH, MS  
NIP. 130524741



Ketua Panitia

Dr. Efendi Napitupulu, MPd.  
NIP. 131663505



Ketua LPM

Drs. B. Ambarita M.Pd.  
NIP. 131411227

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

# PENGEMBANGAN DAN INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN INDONESIA BERBASIS KOMPETENSI

Wesly Hutabarat

Jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Negeri Medan

## Abstrak

Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Kompetensi didasarkan pada perubahan pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah sebagai Daerah Otonom untuk menentukan kompetensi siswa; kurikulum dan materi pokok; penilaian nasional; dan kalender pendidikan, Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999. Dengan terbentuknya otonomi daerah maka pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan sekolah dan *stakeholder* guna membina siswa menjadi manusia yang mandiri dan berbekal keterampilan hidup sesuai dengan lingkungan kehidupan siswa.

Kata kunci: Pendidikan Berbasis Kompetensi, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Pengajaran Berbasis Kompetensi

### 1.1. Pendahuluan

Filosofi yang mendasari terjadinya perubahan kurikulum 1994 ke dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah pentingnya peserta didik dibekali dengan kompetensi dasar yang meliputi kemampuan, keterampilan, sikap dan perilaku dasar dalam mengausasi materi pokok dan indikator pencapaian hasil belajar.

Dengan terjadinya perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai akibat dari perkembangan dunia teknologi yang begitu cepat, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mendapat perhatian serius guna mengantisipasi masuknya teknologi baru internet ke dalam dunia

pendidikan. Oleh karena itu Indonesia melalui penutakhiran kurikulum dan inovasi kurikulum di semua jenjang pendidikan perlu memperhatikan keterkaitan di dunia teknologi informatika ke dalam dunia pendidikan. Perubahan kurikulum guna menyelaraskan beban mata pelajaran dengan permintaan pasar maka dipandang perlu melakukan perubahan kurikulum sesuai permintaan pasar.

Dengan penyesuaian kurikulum sesuai permintaan pasar atau *stakeholder* maka dunia pendidikan harus memperhatikan kompetensi anak didik setelah menyelesaikan studinya. Dengan demikian maka penyesuaian kurikulum perlu dikembangkan sesuai dengan

kompetensi siswa. Untuk itu kurikulum diselenggarakan berbasis kompetensi. Perkembangan kurikulum dimaksud berdasarkan kompetensi siswa yang mencakup aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olahraga, dan perilaku. Perkembangan bidang moral harus diselenggarakan dengan peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup atau lebih dikenal dengan istilah *life skills*. Kecakapan *life skills* dimaksudkan agar siswa dapat mencapai kompetensi kecakapan hidup yang kemudian dapat di implementasikan dalam kehidupan siswa sehari-hari apabila memasuki dunia kehidupan masyarakat dewasa, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja sendiri untuk bertahan hidup (Putrayasa. 2003).

Perwujudan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi di dasarkan pada kebijakan Nasional

1. Perubahan Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan.
2. Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN
3. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah sebagai Daerah Otonom

menentukan: kompetensi siswa; kurikulum dan materi pokok; penilaian nasional; dan kalender pendidikan.

5. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 yang antara lain; perlu dilakukan penyempurnaan sistem pendidikan dan penyempurnaan kurikulum serta diversifikasi.
6. Gerakan peningkatan mutu pendidikan oleh Presiden (Depdiknas. 2003a: 8)

Berdasarkan pertimbangan pada landasan hukum di atas maka pelaksanaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi perlu segera dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan agar dapat menyelaraskannya dengan dunia pendidikan internasional. Beberapa tahun belakangan ini pelaksanaan pendidikan hanya terfokus pada perkembangan kognitif sehingga seolah-olah mengabaikan perkembangan moral, akhlak dan budi pekerti peserta didik. Sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara perilaku dan pertimbangan moral di dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sebagai anggota masyarakat perlu dijamin sehingga tatanan kehidupan bangsa dapat berlangsung dengan baik. Untuk itu perlu dikembangkannya kemampuan keterampilan hidup sejak dini sehingga anak didik dapat berkembang dan mampu mengembangkan diri setelah mereka

menyelesaikan pendidikannya baik disekolah lanjutan atas maupun setelah menyelesaikan perkuliahan di perguruan tinggi (Depdiknas. 2003a).

Sebagaimana diketahui bahwa hampir semua Negara di seluruh Dunia berusaha mengembangkan pendidikannya dengan memberlakukan kurikulum berbasis kompetensi untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan sekaligus memberikan mereka keterampilan hidup untuk masa depannya (Putrayasa. 2003). Dengan terjadinya perkembangan dunia teknologi yang telah merasuk ke dalam dunia kehidupan masyarakat menyebabkan perlunya dipertimbangkan perubahan tatanan kurikulum yang sejajar dengan perkembangan Dunia Teknologi dan *stakeholder* sehingga memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia sejak tahun 1966 telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui perubahan kurikulum guna mendukung permintaan *stakeholder* dan masyarakat, sehingga mendukung kehidupan masyarakat. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang dinyatakan dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi dari sistim pendidikan terpusat ke sistim pendidikan desentralisasi dalam pengambilan

keputusan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dengan demikian kewenangan pengambilan keputusan tentang

1. Penetapan standar kompetensi peserta didik dan warga belajar.
2. Pengaturan kurikulum nasional.
3. Penilaian hasil belajar secara nasional.
4. Penyusunan pedoman pelaksanaan.
5. Penetapan standar materi pelajaran pokok, penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah sebahagian diserahkan ke pemerintah daerah. Selanjutnya, UU No. 22 tahun 1999 dan pp No. 25 tahun 2000 memberikan kebijaksanaan pengelolaan pendidikan terpusat ke desentralisasi. Hal ini ditujukan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan menyeluruh karena daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan siswa agar sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* dan masyarakat. Sehingga pembuatan silabus diserahkan kepada sekolah dan daerah (Depdiknas. 2003a: Depdiknas. (2003b).

## **1.2. Pengertian Pendidikan Berbasis Kompetensi**

Pendidikan Berbasis Kompetensi (PBK) dengan pendekatan pengajaran dan

pembelajaran telah banyak diperhatikan dan dukungan dalam profesi guru dewasa ini. Tetapi, dengan berbagai konsep yang baru lahir, tidak ada definisi umum yang digunakan tapi ada elemen yang sama. Elemen yang paling utama adalah bahwa peserta didik harus terlibat dan aktif dalam semua aspek untuk mencapai pengetahuan, keterampilan dan perilaku profesional yang diperlukan untuk menunjukkan keterampilan dalam suatu disiplin ilmu. Dengan kata lain, pendidikan berbasis kompetensi menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang memfasilitasi perkembangan dan kemampuan kompetensi peserta didik (Mulyasa, 2002). Elemen lainnya, adalah meliputi kebutuhan untuk mencapai definisi berdasarkan bukti hasil pembelajaran yang dapat ditunjukkan dari kinerja dari sudut peran profesional yaitu kompetensi khusus. Kejelasan ini perlu kepada guru dan siswa karena hal itu menunjukkan hasil belajar yang diharapkan tanpa ada sesuatu yang tersembunyi. Menentukan hasil belajar membutuhkan banyak pengalaman tapi sangat berharga bagi guru dan siswa.

Definisi pendidikan berbasis kompetensi dalam mempersiapkan guru yang berkualitas adalah kurikulum atau program studi yang bertujuan untuk

mencapai hasil belajar. Kompetensi khusus bagi guru bantu adalah mempunyai domain kompetensi dan pengetahuan yang sesuai, keterampilan dan perilaku yang langsung berhubungan dengan kompetensi kurikulum dan hasil belajar yang diharapkan dari seorang guru bantu yang berkualitas.

Kompetensi ini juga mengizinkan penilaian berdasarkan *criterion-referenced* untuk seluruh program, untuk menghilangkan bias penilaian guru. Aspek lain dari pendidikan berbasis kompetensi adalah meliputi perhatian atas kebutuhan hasil belajar dan pola kedewasaan, memberikan waktu yang dibutuhkan bagi siswa untuk mencapai dan secara terus-menerus menunjukkan kompetensi yang diharapkan yaitu pengetahuan, skill, dan perilaku profesional dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran.

Seluruh profesi guru harus mempunyai mandat social untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan ke peserta didik dan oleh karena itu perlu melibatkan akuntabilitas sosial di dalam proses pendidikan yaitu relevansi, biaya efektif, ekuiti dan kualitas.

Pendidikan berbasis kompetensi dapat dicapai melalui berbagai pendekatan desain kurikulum. Akan tetapi apapun desainnya, semua kurikulum perlu

berdasarkan pada bukti dan fokus pada *outcome* dan semua strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan *domain* pembelajaran yakni psikomotor, afektif dan kognitif.

Secara ringkas pendidikan berbasis kompetensi secara definisi memerlukan guru sebagai seorang ahli dibidangnya yang dinyatakan dengan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan sebagai guru bantu dalam kualifikasi yang diperlukan. Kompetensi khusus bagi guru bantu menurut pendidikan berbasis kompetensi adalah semua siswa mempunyai pilihan terbatas dalam kebutuhan kompetensi yang akan dimiliki. Tetapi siswa mempunyai pilihan dalam bagaimana mereka belajar untuk mencapai pengetahuan yang diperlukan, skill, dan perilaku profesional

### 1.3. Pengertian Pengajaran Berbasis Kompetensi

Pengajaran Berbasis Kompetensi membutuhkan pembelajaran berbasis kompetensi. Adapun pengajaran berbasis kompetensi meliputi karakteristik berikut. Karakteristik guru dan harapan yang mendukung keberhasilan siswa (Springer dan Creedy, 1992).. Guru juga harus menunjukkan tanggung jawab bersama dengan siswa untuk mencapai tujuan kompetensi.

Atribut pengajaran berbasis kompetensi adalah:

1. Memahami Bagaimana Siswa Belajar.
2. Menyesuaikan Prinsip Belajar dan Mengajar
3. Memfasilitasi Ketimbang Mengontrol Pembelajaran.
4. Model Berpikir Kritis, Respek, Kompetensi dan Peduli Setiap Saat
5. Mendukung Pencapaian Pengetahuan, Skill dan Perilaku Profesional dalam Semua Aspek *Domain* Pembelajaran (Kognitif, Psikomotor, dan Afektif)
6. Mempromosikan dan Mengharapkan Akuntabilitas Pembelajaran
7. Menyediakan waktu, Balikan Spesifik atas Progres Siswa Dimulai dari Penilaian Diri Sendiri Siswa
8. Pembelajaran Individual Sesuai Kebutuhan
9. Mengharapkan Pertumbuhan Kompetensi sesuai dengan Progres Peserta Didik dalam Seluruh Program (Springer dan Creedy, 1992).

### 1.4. Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi

Adapun strategi pembelajaran yang sesuai dengan pendidikan berbasis kompetensi adalah strategi pembelajaran yang sesuai dengan *domain* pembelajaran dan kurikulum (Springer dan Creedy, 1992).. Beberapa strategi pembelajaran

efektif di dalam kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada atribut pengajaran berbasis kompetensi meliputi domain psikomotor berikut. Menunjukkan cara-cara yang diharapkan untuk melakukan suatu keterampilan. Mengizinkan siswa melaksanakannya seketika dan kemudian meminta melakukannya kembali keterampilan tersebut. Menentukan sebuah model atau menciptakan pelatihan simulasi di dalam laboratorium dimana siswa dalam mengulanginya kembali dengan teman kerjanya atau dengan guru dan supervisor. Merancang pengalaman praktek yang cukup dan memerlukan kinerja keterampilan dengan siswa di bawah supervisor langsung. Membuat penilaian yang *reliable* dalam menentukan keterampilan yang dilakukan (Springer dan Creedy. 1992).

#### 1.4.1. Domain Afektif.

Membuat nilai-nilai penilain yang jelas untuk nilai personal (Springer dan Creedy . 1992). Membuat suatu kerangka kerja untuk analisis tertulis dari guru bantu sesuai kode etik guru atau kode etik siswa. Kesempatan terstruktur untuk bermain peran membutuhkan pengakuan dari nilai-nilai yang berbeda dan keyakinan, dengan waktu diskusi tentang bagaimana perbedaan itu dapat

mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memberikan kepedulian guru. Susun waktu sesuai dengan ras yang berbeda, suku, atau statu ekonomi sosial untuk bekerjasama denag kelompok siswa untuk mendiskusikan nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda, terutama hal-hal yang berkenaan dengan keyakinan pengetahuan praktis (Springer dan Creedy. 1992). Menciptakan alat penilaian yang *valid* dan *reliable* untuk digunakan dalam menentukan praktek keterampilan meliputi integritas, respek untuk semua orang, dan menyimpan rahasia (Springer dan Creedy. 1992).

#### 1.4.2. Domain Kognitif.

Kembangkan sebuah studi kasus dari praktek lapangan yang berdasarkan masalah (*problem-based learning*) untuk menentukan yang paling sesuai, pendekatan berdasarkan bukti atas kepedulian guru. Pusatkan pada studi kasus awal atas praktek kerja, berikan dukungan atas seminar siswa, atur jalannya debat dalam menjalankan pelaksanaan praktek yang kompleks. Selalu diminta agar siswa memberikan alasan atas jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan pengetahuan atau rencana pelaksanaan kerja kelompok maupun mandiri. Hindari untuk menjawab semua pertanyaan siswa, terutama ketika

mereka mengetahui atau harus tahu jawabannya. Strategi lain adalah dengan memberikan modul belajar sendiri (*self-study modules*) dengan memberikan kegiatan pembelajaran yang dapat diselesaikan siswa berdasarkan kerjasama interaksi siswa dan guru (Springer dan Creedy, 1992)..

Sangat penting bila guru memberikan waktu yang cukup untuk diskusi atau dialog dan klarifikasi konsep-konsep yang akan dipelajari. Para guru juga perlu mendorong dan membantu siswa menggunakan pengetahuan dan idenya untuk mencari tahu kemungkinan solusi atas situasi klinis. Salah satu strategi pembelajaran yang paling efektif untuk mengarahkan siswa menemukan bagaimana memulai atau bertindak disebut pertanyaan *Socratic*. Tujuan utama pertanyaan *Socratic* atau pertanyaan tingkat tinggi adalah mendorong siswa untuk menantang bagaimana mereka berpikir, apa yang mereka pikirkan, dan revisi apa yang mereka pikirkan yang akan mengarah ke tujuan untuk menjadi seorang siswa yang kompeten. Semua domain pembelajaran selama praktek kerja dilakukan dengan: memilih tempat kerja yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tingkat kinerja pada waktu tertentu.

Gunakan proses peduli kerja sebagai kerangka kerja untuk pengajaran klinis dan penilaian, mulai dengan mengumpulkan data dan bergerak melalui setiap tahap proses tersebut. Dalam hal ini siswa dituntun untuk pengumpulan data secara lengkap sebelum membuat keputusan, dan kemudian membuat rencana kepedulian atas pembuatan keputusan dan kebutuhan siswa, memperhatikan rencana tersebut.

Setiap strategi pembelajaran ini ditujukan untuk membantu cara perkembangan berpikir siswa tentang apa yang mereka pelajari, mendorong mereka dalam mendapatkan pengetahuan baru dan keterampilan dengan menggunakan berpikir kritis dan mendukung usaha mereka untuk mengintegrasikan pengetahuan baru ini ke dalam praktek di laboratorium (Springer dan Creedy, 1992).

Guru bertindak sebagai pelatih/tutor pembelajaran daripada sebagai seorang guru yang maha tahu yang memberitahu siswa apa yang harus dipelajari, bagaimana belajar, dan apa yang harus dilakukan dengan pelajaran baru tersebut.

### **1.5.Pengertian Pembelajaran Berbasis Kompetensi**

Pembelajaran berbasis kompetensi (PBK) dapat dipandang sebagai kegiatan

mengatur aktivitas pembelajaran sehingga individu siswa dapat mencapai kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Diketahui bahwa siswa dewasa mempunyai ragam cara belajar atau gaya belajar. Sangat penting bagi siswa untuk mengenal bahwa pembelajaran berbasis kompetensi menggambarkan apa yang sebenarnya mereka kerjakan atau lakukan, daripada belajar dari pengamatan. Observasi, refleksi dan mendengarkan adalah merupakan kegiatan pembelajaran yang penting, tetapi demonstrasi kompetensi merupakan hasil yang diharapkan bagi pendidikan seorang siswa.

Berikut ini dapat dilihat atribut inti pembelajaran berbasis kompetensi:

1. Mengerti bagaimana gaya belajar terbaik seseorang.
2. Mengerti dengan benar hasil belajar apa yang diharapkan
3. Bertanggung jawab atas pembelajaran seseorang
4. Memotivasi untuk belajar berorientasi tujuan
5. Jadilah seorang pribadi dan praktisi yang etis
6. Berpikir kritis
7. Menilai kinerja dan pembelajaran sendiri

8. Bertekad pada pelajaran yang sedang berlangsung (Frost. 1996: Springer dan Creedy. 1992).

### 1.6. Kegiatan dalam Pembelajaran berbasis Kompetensi

Sebagaimana diketahui ada beberapa kegiatan yang efektif dilakukan dalam mengembangkan pendidikan siswa berkualitas berbasis kompetensi. Sebagai contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah berkenaan dengan domain pembelajaran.

#### 1.6.1. Domain Psikomotor

**(Psychomotor domain):** meliputi review penjelasan tertulis keterampilan tertentu (*text, handouts*). Lakukan beberapa kali praktek keterampilan (*skill*) di laboratorium dengan menggunakan model, atau simulasi atau dengan pasangan siswa didukung dengan guru sehingga memahami keterampilan tersebut

#### 1.6.2. Domain afektif (Affective domain):

Review isi teks atas definisi nilai-nilai. Ikutserta dalam klarifikasi pelatihan nilai-nilai tertentu atas nilai-nilai personal yang diberikan guru (*self-study or group work*). Tuliskan analisis kode etik siswa (*local or international*) dan berbagi dengan teman kerja dan guru-guru.

Refleksikan bagaimana nilai pribadi seseorang mempengaruhi kemampuannya untuk menjadikan peduli kerja dari berbagai budaya atau ras atau mereka yang tidak peduli kerjanya.

### **1.6.3. Domain Kognitif (Cognitive domain):**

Pembelajaran berbasis kompetensi memerlukan tingkat berpikir tinggi kritis dan refleksi (*metacognition – thinking about thinking*). Keterampilan itu dipelajari dengan baik dengan sejumlah bentuk pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pembelajarn *discovery* atau *problem-based learning* meliputi membantu siswa karena partisipasi aktif di dalam dan bertanggung jawab atas pembelajarannya, mendorong perkembangan berpikir kritis dengan mendukung usaha siswa untuk mengambil dan mempertahankan pengetahuan dan menggunakannya dalam praktek dan menciptakan siswa yang mengembangkan kebiasaan pembelajarn seumur hidup untuk tetap dalam kegiatan praktek masa kini.

Teman kerja adalah komponen penting pembelajaran sebagaimana kegiatan pembelajarn terstruktur untuk kelompok siswa bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik atas kebutuhan tertentu atau masalah dalam kerja teoritis

dan praktek. Kegiatan pembelajaran kognitif lainnya menciptakan dan mengikuti rencana pembelajarn individual, membaca secara mandiri dan menyelesaikan kegiatan yang dianjurkan yang akan menambah pengetahuan seseorang yang berdasarkan pengalaman, dan menggunakan jaringan internet dan intranet secara mandiri. Persiapkan untuk diskusi seminar dan pertahankan sebuah jurnal atau tetap pada kemajuan pembelajaran.

### **1.7. Peran KBK dalam Pengembangan dan Inovasi Pendidikan**

Pendidikan berdasarkan kompetensi dapat dipandang sebagai suatu proses institusional yang menggerakkan pendidikan dengan memusatkan pada kebutuhan para lulusan untuk diketahui menurut guru ke pada apa yang dibutuhkan peserta didik untuk diketahui dan untuk dapat melakukannya di dalam situasi yang berbeda dan kompleks. Pendidikan berdasarkan kompetensi (PBK) (*Competency-based education*) memusatkan pada hasil belajar siswa yang dihubungkan dengan kebutuhan tenaga kerja sesuai profesi (Frost M. 1996: Springer dan Creedy. 1992).

Hasil akhir pendidikan berdasarkan kompetensi terus meningkat secara alamiah, dibanding pendidikan

berdasarkan tujuan pendidikan tingkat rendah. PBK sering menghasilkan penilaian yang lebih kompleks, meliputi portofolio, penilaian pengalaman belajar, demonstrasi di berbagai konteks dan bermain peran, rangkaian keterampilan yang besar dipecahkan ke dalam kompetensi yang mempunyai tingkat urutan pemahaman. Kompetensi menguatkan satu sama lain dari dasar ke tingkat lanjut ketika pembelajaran berlangsung, dampak pertumbuhan kompetensi sejajar dan secara keseluruhan lebih besar dari jumlah komponennya. Tantangannya adalah kompetensi mana yang dapat disatukan bersama untuk memberikan kelompok optimal dalam menjalankan tugas-tugas.

Tantangan lainnya adalah mendesain pengalaman belajar yang mendukung siswa ketika mereka belajar dan menggunakan kompetensi ini dalam konteks yang berbeda (Mulyasa, 2002). Pemulusan kompetensi secara terus menerus perlu sehingga peningkatan kinerja dalam berbagai konteks dapat ditentukan. Intinya, PBK adalah suatu proses bukan produk. PBK lebih dari usaha atau daftar pendidikan dan tujuan perilaku.

Penekanan awal terhadap perilaku tujuan belajar atas pengamatan yang reliabel dan penilaian perlu dilakukan.

Penulisan tujuan perilaku diarahkan ke hasil belajar dalam bentuk yang lebih operasional yang dapat diamati dengan menggunakan proses pengamatan yang konsisten dan tidak membutuhkan interpretasi (Bloom, 1971). Untuk mencapai reliabilitas ini, kata kerja perilaku dari daftar kata kerja perilaku (yaitu menyatakan pernyataan, mendaftarkan, menyebutkan, mengenal, menjelaskan, menghitung, menggambarkan, mensintesis dan menganalisis) diperlukan untuk menilai secara obyektif (Bloom, 1971).. Keterbatasan ini mengarah pada kritik atas pendekatan ini yang berakibat pada tujuan ganda perilaku yang tidak menyeimbangkan tenaga kerja siswa secara fungsional. Hubungan kompetensi terhadap misi sekolah dan program, pembelajaran dan tujuan pembelajaran sebagai tambahan terhadap penjelasan hasil belajar siswa sebagaimana dihubungkan dengan kebutuhan tenaga kerja dan ekspektasi, kompetensi sangat kritis untuk dihubungkan dengan tujuan pembelajaran dan terhadap tujuan instruksional. Kriteria yang diperlukan adalah menyatakan misi yang didukung oleh tujuan instruksional untuk pembelajaran, pelayanan dan penelitian. Tujuan dinyatakan dalam pernyataan yang luas tentang bagaimana usaha

pembelajaran dilakukan, pelayanan dan instruksi mengarah kepada pernyataan misi. Tujuan harus didukung oleh tujuan khusus yang lebih spesifik, pernyataan yang dapat mengukur apa yang dinyatakan dalam rencana pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran, pelayanan dan instruksional. Tujuan pembelajaran adalah tahapan pernyataan yang terukur yang mengarah pada tujuan pengajaran (Bloom, 1971). Tujuan harus mencakup pemahaman yang akan mengimplementasikan misi pendidikan. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan derajat pencapaian yang harus dicapai (Bloom, 1971).

KBK dapat dipandang sebagai suatu pembentukan dan pengembangan kompetensi bagi siswa secara dini agar para lulusan kelak dapat mandiri setelah mereka menyelesaikan studinya dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat melalui keterampilan hidup yang ditanamkan pada diri siswa.

### 1.8. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran berdasarkan kompetensi hanya dapat berhasil guna bilamana ditunjang dengan kurikulum berbasis kompetensi yang dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan siswa dan sekolah serta

stakeholder. Oleh karena itu pemberian tanggung jawab perlu diberikan kepada sekolah dalam menentukan kurikulum sekolah sehingga siswa dan guru dapat bekerjasama dalam mengembangkan ketrampilan hidup berdasarkan lingkungan belajar siswa. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perkembangan dunia teknologi dan informatika, maka sangat penting untuk menyesuaikan tujuan pendidikan berdasarkan kompetensi siswa yang diperlukan dalam lingkungan kehidupannya.

#### Daftar Buku Bacaan

1. Bloom, B. S. (1971). *Mastery learning*. In J. H. Block (Ed.), *Mastery learning: Theory and practice*. New York: Holt, Rinehart & Winston
2. Depdiknas. (2003a). *Pelayanan Profesional Kurikulum 2004. Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta, <http://www.mau.sekolah.weebly.com/uploads/9/6/2/2/9622279/kurikulum-berbasis-kompetensi.pdf>
3. Depdiknas. (2003b). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas. <http://www.fti.itb.ac.id/wp-content/uploads/2015/06/UU-No-20-Tahun-2003-Sisdiknas.pdf>

4. Frost M. (1996). An analysis of the scope and value of problem based learning in the education of health care professionals. *Journal of Advanced Nursing* 6 (4): 1996, pp. 1047-1053.
5. Mulyasa, E. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Rosdakarya.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. [http://ditpolkom. Bappenas .go.id/ basedir /Peraturan% 20 Perundang -Undangan/ 1\)%20 Bidang % 20 Politik% 20 Dalam % 20Negeri/3\)%20 Otonomi %20 Daerah /PP%20No.25%20Tahun%202000.pdf](http://ditpolkom. Bappenas .go.id/ basedir /Peraturan% 20 Perundang -Undangan/ 1)%20 Bidang % 20 Politik% 20 Dalam % 20Negeri/3)%20 Otonomi %20 Daerah /PP%20No.25%20Tahun%202000.pdf)
7. Putrayasa, I. B. (2003). Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK): Ancangan dalam Pengimplementasiannya. *Jurnan Pendidikan dan Pengajaran IKIP Singaraja*, edisi khusus. TH XXXVI. Desember 2003.
8. Springer dan Creedy D (1992). Problem-based learning in nurse education: An Australian view. *Journal of Advanced Nursing* 17: 1992, pp. 723-727.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah. <http://prokum.esdm .go.id/uu/1999/uu-22-1999.pdf>